



Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Timur

Muhammad Rendi Oktavianto
Universitas Airlangga, Indonesia
muhammad.rendi.oktavianto-2022@feb.unair.ac.id

Abstract

Good governance has principles of effective finance, because quality financial reporting creates accountability for public institutions. In order to preserve responsibility for the performance of government agencies in East Java, this study aims to understand how public sector accounting is employed, how financial report quality is checked, and how these elements interact. Surveys and library research are utilized as data gathering methods in the descriptive quantitative research methodology. Meanwhile, the object of this study is the Regional Apparatus Organization (OPD) in East Java. The results of the study found that the application of public sector accounting and supervision has an impact on the accuracy of financial reports and the consequences are for holding government entities accountable for their performance. Accountability for how well government institutions function is very important for the creation of good governance and can be demonstrated by the quality of financial reports with good accounting discipline. Thus, the importance of the application of public sector accounting and supervision of the accuracy of financial reports and implications for the accountability of government agencies for their performance.

Keywords: Accounting; Financial Statements; Accountability

Abstrak

Pemerintahan yang baik memiliki prinsip keuangan yang efektif, dikarenakan pelaporan keuangan yang berkualitas melahirkan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik. Tujuan pada penelitian ini agar mengetahui bagaimana akuntansi sektor publik digunakan, bagaimana kualitas laporan keuangan diawasi, dan apa dampak dari faktor-faktor tersebut dalam menjaga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur. Metode penelitian yang diterapkan merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif serta sistem akumulasi data meliputi *Survey* dan *Library Research*. Sedangkan objek penelitian yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Jawa Timur. Temuan penelitian didapatkan bahwa implementasi akuntansi sektor publik serta pengawasan berdampak pada keakuratan laporan keuangan dan konsekuensinya untuk meminta pertanggungjawaban entitas pemerintah atas kinerjanya. Akuntabilitas untuk seberapa baik fungsi lembaga pemerintah sangat penting untuk penciptaan *good governance* dan dapat ditunjukkan oleh kualitas laporan keuangan dengan disiplin akuntansi yang baik. Dengan demikian, pentingnya pengaplikasian akuntansi sektor publik serta pemeriksaan terhadap keakuratan laporan finansial serta berimplikasi terhadap pertanggungjawaban instansi negara atas kinerjanya.

Kata Kunci: Akuntansi; Laporan Keuangan; Akuntabilitas

Pendahuluan

Pemerintah yang baik adalah suatu pencapaian dalam keberlangsungan proses membangun negara sesuai visi misi yang telah dirancang. Dalam tangga menuju kesuksesan tersebut setiap pemerintah perlu memiliki kemampuan dalam manajemen sumber daya di negaranya, termasuk keuangan (Nugraeni & Budiantara, 2015). Aturan pengelolaan keuangan yang baik pasti berpengaruh pada pekerjaan pemerintah dalam proses pembuatan laporan keuangan. Supaya kualitas laporan keuangan tinggi maka perlu mengikuti prinsip kerja akuntansi dengan menginformasikan dan pembuatan laporan keuangan yang dimaksud. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan peraturan perundang-undangan, inti isinya yaitu AKIP merupakan sebagai bagian dari usaha pemerintah dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, dan akuntabel (Wina & Khairani, 2018). Di Indonesia sendiri pengelolaan keuangan sudah masuk pada zaman dimana transparansi serta akuntabilitas yang dilihat berdasar pada UU No 17 Tahun 2002 yang inti bunyinya yaitu Keuangan Negara, yang mengamanatkan agar semua badan pemerintah pusat dan daerah menyampaikan laporan keuangan kepada DPR/D sebagai bagian dari tanggung jawab masing-masing pelaksanaan APBN/D (Santoso & Pabelum, 2008).

Perlunya membuat laporan yang berkualitas oleh pemerintah daerah karena kualitas laporan keuangan yang dibuatnya akan mencerminkan tertib pengelolaa keuangan, termasuk pada tertib administrasi serta taat asas. Laporan keuangan pemerintah perlu menyampaikan informasi yang berdasar pada Standar Akutansi Pemerintah (SAP), yakni suatu laporan yang memiliki manfaat bagi penggunaanya pada proses menilai akuntabilitas (Sholohah et al., 2019). Harapan publik juga termasuk pada faktor yang memiliki pengaruh penting untuk mengubah proses manajemen pemerintahan. Tidak hanya itu berbagai rangkaian proses yang banyak dan beragam seringkali kontradiktif dan membuat pelaksana kebingungan. Upaya dalam mewujudkan akuntabilitas publik meninggalkan banyak pekerjaan lebih. Adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan peraturan daerah dan akuntabilitas publik tidak begitu saja melahirkan pemerintahan yang bersinergi serta akuntabel (Akbar, 2018). Menurut Darwins dalam Ridzal, (2020) menyatakan bahwa bagian penting agar membuat akuntabilitas lembaga publik terletak pada laporan keuangan sektor publik, dengan laporan keuangan yang baik dapat menjadi wujud keterbukaan dan dapat digunakan sebagai syarat pendukung akuntabilitas dengan keterbukaan pemerintah sebab proses manajemen sumber daya publik.

Mengklasifikasikan, mengevaluasi, meringkas, dan membuat laporan manajemen keuangan untuk entitas publik adalah proses akuntansi sektor publik. Laporan pengelolaan keuangan akan disediakan oleh lembaga publik kepada orang-orang yang membutuhkannya sebagai informasi karena sangat berguna dan membantu dalam pengambilan keputusan. Untuk menangani berbagai macam keuangan publik, lembaga tinggi negara dan lembaga bawahannya juga telah membentuk kerangka kerja teknologi dan analisis akuntansi. Akuntansi di sektor publik berfungsi sebagai sumber untuk sistem informasi serta kontrol manajemen (*management control*), dan akuntabilitas (*accountability*). Semua lembaga pemerintah serta bisnis komersial atau nirlaba berada dalam lingkup akuntansi sektor publik. Organisasi nirlaba, instansi pemerintah daerah, LSM, partai politik, yayasan, rumah sakit, sekolah yang berafiliasi dengan gereja, dan perguruan tinggi adalah beberapa contoh organisasi yang menggunakan jenis akuntansi ini. Definisi lain dari akuntansi sektor publik mencakup setiap organisasi yang menggunakan keuangan publik. Ini adalah alasan di balik akuntabilitas institusional untuk anggaran publik, yang mengharuskan organisasi ini menggunakan sistem akuntansi ini untuk mengungkapkan informasi keuangan mereka. Badan ini berada di bawah banyak

akuntabilitas karena menggunakan akuntansi sektor publik. Dikarenakan domain publik sendiri luas dan kompleks, tugas menghasilkan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, pemungutan pajak, layanan komunikasi, angkutan umum, serta lainnya, merupakan contoh pekerjaan yang dapat dilakukan oleh sektor swasta di samping sebagian tanggung jawab dan fungsi sektor publik. Namun, untuk beberapa pekerjaan, seperti yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah, sektor swasta tidak dapat menggantikan posisi sektor publik. Oleh karenanya, tugas serta fungsi sektor publik tidak mampu dialihkan dengan sektor swasta karena dalam hal ini bersangkutan dengan publik yang mana menggunakan anggaran publik yang pertanggung jawabannya juga harus kepada masyarakat dan bersifat terbuka untuk publik.

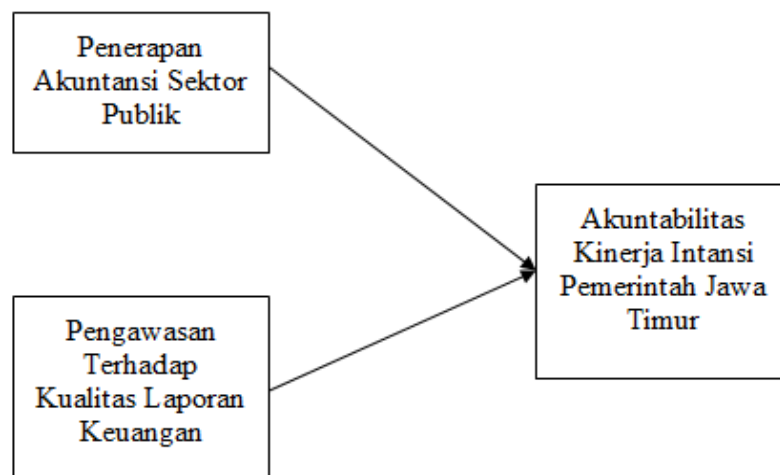
Berdasarkan uraian di atas, pentingnya laporan keuangan pada sektor publik yang nantinya berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan itu sendiri mewujudkan ide peneliti untuk melaksanakan penelitian berjudul “Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

Metode

Kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang diterapkan pada penelitian ini. Kuantitatif merupakan suatu penelitian yang melahirkan berbagai penemuan yang didapatkan dengan proses penghitungan atau pengukuran. Adapun metode deskriptif bertujuan untuk dapat melahirkan suatu kesimpulan yang objektif mengenai keadaan melalui proses pengumpulan data, interpretasi data serta hasilnya. *Survey* serta *Library Research* digunakan sebagai metode pengumpulan data. *Survey* merupakan sebuah research yang menyajikan kesimpulan data secara sederhana untuk mendapatkan deskripsi berbagai gejala, fenomena, serta fakta. Sedangkan, *Library Research* merupakan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan berbagai data yang dibutuhkan, kemudian dibaca serta dicatat dan terakhir diolah. Sampel yang digunakan didapatkan dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah sebuah cara dalam menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan. Sedangkan objek penelitian ialah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terletak di Jawa Timur. Hipotesis penelitian ini yaitu:

- H1: Terdapat pengaruh antara penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur.
- H2: Terdapat pengaruh antara pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur.

Berikut ini menjelaskan kerangka pemikiran penelitian:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hasil dan Pembahasan

1. Uji Reliabilitas

Reliabilitas tes, sering dikenal sebagai keandalan, digunakan untuk menentukan apakah hasil pengukuran berulang akan tetap konsisten atau tidak. Reliabilitas instrumen, dengan kata lain, menggambarkan tingkat konsistensi. Teknik *Cronbach Alpha* digunakan dalam uji reliabilitas penelitian ini. Janti (2014) menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam pengujian reliabilitas seperti di bawah ini:

- Cronbach's alpha $> 0,7$ = reliabilitas cukup baik.
- Cronbach's alpha $0,8$ atau di atasnya = reliabilitas baik.

Pengujian reliabilitas variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1), Kualitas Laporan Keuangan (X2), serta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jawa Timur (Y) yaitu :

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan akuntansi sektor publik	0,821	Reliable
Pengawasan kualitas laporan keuangan	0,712	Reliable
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0,717	Reliable

Setiap variabel memiliki nilai *cronbach alpha* yang berbeda, seperti yang terlihat dalam Tabel 1. Selain itu, dapat dikatakan bahwa setiap variabel pada kuesioner yang digunakan didapatkan semuanya *reliable*.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	10.421	4.125
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)	.503	.122
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)	.081	.131

$$Y = 10.421 + 0.503X1 + 0.081X2$$

Keterangan :

X1 : Penerapan Akuntansi Sektor Publik

X2 : Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Disimpulkan bahwa:

- Nilai $Y = 10.421$ mendeskripsikan bahwa pengaplikasian akuntansi pada sektor publik serta pemeriksaan berkelanjutan terhadap keakuratan laporan finansial konsisten maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bernilai 10.421 atau peningkatan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur.

- b. Nilai pada variabel penerapan akuntansi sektor publik (X_1) = 0.503 dapat diartikan bahwa apabila implementasi akuntansi sektor publik meningkat, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur (Y) meningkat sebanyak 0.503 dengan syarat variabel lain tetap konsisten.
- c. Nilai pada variabel pengawasan kualitas laporan keuangan (X_2) = 0.081 diartikan bahwa apabila pemeriksaan terhadap kualitas laporan finansial meningkat, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur (Y) meningkat sebanyak 0.081 dengan syarat variabel lain tetap konsisten.

3. Uji t

Tujuan pengujian hipotesis adalah guna menganalisis hipotesis dalam penelitian ini ditolak atau diterima. Uji signifikansi parsial (uji T) diterapkan dalam statistik guna menentukan apakah hipotesis itu benar. Nilai statistik t untuk uji pengaruh parsial ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficiens		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	10.241	4.125		2.4370	.015
<u>Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1)</u>	.503	.122	.517	4.121	.000
<u>Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2)</u>	.081	.131	.056	.559	.047

Menurut Tabel 3. berhasil ditarik kesimpulan bahwa signifikansi Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1) sejumlah 0,000, yang maknanya $< 0,05$ sehingga dapat dijelaskan bahwa penerapan akuntansi sektor publik (X_1) berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur. Kemudian, signifikansi pengawasan kualitas laporan keuangan (X_2) 0,047 $< 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan kualitas laporan keuangan (X_2) berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur.

4. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Jawa Timur

Hipotesis pertama bahwa ada pengaruh antara implementasi akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur. Temuan uji t didapatkan signifikansi 0,000 yang maknanya $< 0,05$. Maka dari itu, penerapan akuntansi sektor publik (X_1) berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$.

Menurut teori yang mendukung temuan penelitian tersebut, kinerja adalah salah satu *keyword* pemenuhan good governance dalam penyelenggaraan organisasi publik. Oleh karena itu, dapat diterima jika prosedur akuntabilitas publik mengakhiri siklus akuntansi sektor publik. Hasil dari proses organisasi, seperti akuntabilitas publik, audit, pelaporan keuangan, perolehan barang dan jasa, realisasi anggaran, penganggaran, dan perencanaan anggaran, dapat disederhanakan untuk meningkatkan kinerja organisasi (Bastian, 2010).

Temuan ini konsisten dengan penelitian Pamungkas (2012) yang meneliti bagaimana pengaruh implementasi akuntansi sektor publik pada kinerja instansi. Dengan memberikan data akuntabilitas pada tujuan, fungsi, dan item pengeluaran, akuntansi sektor publik digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja entitas pemerintah.

Menurut Santoso & Pambelum, (2008) dalam memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi berakibat pada usaha lahirnya tata kelola yang baik. Aklam investasi akan selalu membaik jika akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperkuat.

Penerapan akuntansi sektor publik juga sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah. Pertanggungjawaban yang tepat serta efektif berakibat pada manajemen yang baik karena membuat masyarakat lebih percaya sehingga berakibat pada kesejahteraan masyarakat terus meningkat (Andriani et al., 2015).

Perpres (Peraturan presiden) RI No.29 Tahun 2014 mendeskripsikan definisi, yang inti isinya yaitu: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/sasaran kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara berkala, instansi pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanahkan. oleh pemangku kepentingan (Hendrianto et al., 2022).

5. Pengaruh Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Jawa Timur

Hipotesis kedua terdapat pengaruh antara pemeriksaan kualitas laporan finansial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur. Temuan uji t didapatkan signifikansi 0,046 yang maknanya $< 0,05$. Artinya, pengawasan kualitas laporan keuangan (X_2) berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Jawa Timur dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$.

Tersedianya laporan finansial yang berkualitas serta baik akan menunjukkan pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang diciptakan, oleh karena itu kualitas laporan keuangan memberikan dampak yang bermakna pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam organisasi sektor publik, pengawasan umumnya dilihat bagaikan suatu langkah yang dikerjakan berulang-ulang dalam hal mengevaluasi, mengawasi, serta mendalami suatu prosedur pekerjaan supaya pemerintah daerah mampu berfungsi dengan baik serta berhasil. Menurut teori *stewardship*, pemerintah daerah bertindak bagaikan *steward*, harus menetapkan tujuan serta menawarkan pelayanan yang sejalan dengan tujuan tersebut. Peningkatan kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu cara pemerintah daerah berhasil memberikan pelayanan yang efisien serta efektif. Pengawasan yang baik juga diperlukan agar kinerja yang maksimal dapat terjadi, sehingga penting untuk peningkatan kinerja (Khairi dan Meiranto, 2021).

Temuan penelitian ini dikuatkan oleh penelitian Aulia, (2021) yang mengklaim bahwa aplikasi akuntansi pada sektor publik serta pemeriksaan kualitas laporan finansial memberikan dampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Santoso (2008) yang menemukan bahwa kualitas laporan finansial berdampak pada akuntabilitas. Secara teoritis, implementasi akuntabilitas sektor publik serta pemeriksaan terhadap kualitas laporan finansial oleh instansi pemerintah tentu berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi tersebut, baik secara bersama-sama atau parsial. Penulis menyimpulkan dari membenaran sebelumnya bahwa akuntabilitas secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas pelaporan keuangan. Mengingat dengan adanya laporan finansial yang kuat ataupun berkualitas tentu menunjukkan tanggung jawab ataupun akuntabilitas dalam pembuatan laporan tersebut.

Temuan penelitian Pamungkas (2012) mendukung pendapat bahwa implementasi kualitas laporan finansial berdampak pada kinerja instansi. Temuan penelitian ini konsisten dengan pendapat The AGA Task Force (1994: 12), Raum (1992: 25), dan Henley (1990: 12), yang menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban diperlukan, bersama dengan

laporan keuangan yang dapat menilai serta mengukur usaha untuk mencapai tujuan, untuk menunjukkan akuntabilitas kinerja.

Pandangan yang senada diutarakan IFAC dalam IPSAS 1 (2000: paragraf 13), Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Draft Publikasian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (2003: KK-7), Carneige, Yuri Ijiri, yang dikutip oleh Hendriksen dan Breda (Wibowo, 2000), dan Freeman (1999), temuan penelitian ini memperkuat pernyataan umum yang pada dasarnya berpendapat bahwa laporan keuangan untuk sektor publik melayani dua tujuan yakni memberikan data berharga guna pengambilan pertimbangan serta mengungkapkan pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Jika laporan keuangan mampu diaudit serta temuan audit mendeskripsikan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan yang diterima secara luas, laporan keuangan akan memenuhi syarat. Kredibilitas akuntansi kinerja di instansi pemerintah dapat dimunculkan dengan kualitas laporan keuangan yang mampu serta selesai diaudit (Pamungkas, 2012).

Kesimpulan

Berlandaskan temuan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh implementasi akuntansi sektor publik serta pemeriksaan terhadap kualitas laporan finansial serta implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian didukung dengan hasil pengujian didapatkan signifikansi implementasi akuntansi sektor publik (X_1) = 0,000 serta signifikansi pengawasan kualitas laporan keuangan (X_2) = 0,046. Terciptanya *good governance* bergantung pada pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang dapat ditunjukkan oleh kualitas laporan finansial dengan disiplin akuntansi yang baik. Dengan demikian, pentingnya implementasi akuntansi sektor publik serta pemeriksaan terhadap kualitas laporan finansial serta berimplikasi pada pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Daftar Pustaka

- Akbar, R. (2018). Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia Studi Awal di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik*, 1(1), 1–12.
- Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 10(2), 51–60.
- Aulia, O. (2021). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 4(2), 181–197.
- Freeman, R. J. & Shoulders, C. D. (1999). *Governmental and Non Profit Accounting, Theory and Practice*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Hendrianto, Alamsyah, S., & Indrawan, A. (2022). Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Instansi Pemerintah. *BALANCE: Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, 19(2), 184–195.
- Hendriksen, E. S. & Breda, M. F. V. (2000). *Teori Akunting, Alih Bahasa Herman Wiboow, Edisi Kelima*. Batam: Interaksara.

- Janti, Suhar. (2014). Analisis Validitas dan Reliabilitas dengan Skala *Likert* terhadap Pengembangan SI/TI dalam Penentuan Pengambilan Keputusan Penerapan Strategi Planning pada Industri Garmen. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST)*.
- Khairi, Y. D. & Meiranto, W. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1-9.
- Marsya, M., & Dewi, R. (2022). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Debt Maturity, dan Kinerja Profitabilitas Terhadap Efisiensi Investasi. *Neraca Keuangan: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 43–53.
- Nugraeni, & Budiantara, M. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 12(1), 18–32.
- Pamungkas, Bambang. (2012). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 12(1).
- Pamungkas, Bambang. (2012). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 12(1).
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. *FINANCIAL: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87–97.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1), 14–33.
- Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Indonesia Accounting Journal*, 2(1), 45–56.
- Sumarmawati, E. D., & Kusasih, I. A. K. R. (2018). Analisis Aparatur Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo). *Accounting Global Journal*, 2(1), 15–33.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1), 3–15.
- Wina, I. P. H., & Khairani, S. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, Dan Dishub Prov). *Core*, 1–15.